

**PROBLEM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DASAR  
(BASIC EDUCATION) SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN  
DI NEGARA BERKEMBANG SUATU TINJAUAN KOMPARATIF**

Oleh  
**Suryati Sidharto**

**Abstrak**

Kemampuan baca warga suatu bangsa sebagai bagian integral dari pendidikan dasar tidak lagi disangsikan urgensinya. Tiap bangsa dan terlebih lagi Negara Berkembang menyadari pentingnya hal tersebut sebagai salah satu langkah awal pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu program penanganan kemampuan baca yang merupakan bagian penting dari pendidikan dasar ini selalu mendapat prioritas tinggi dalam pembangunan. Wujud pemrioritasan tersebut umumnya dimulai dengan diadakannya program pemberantasan buta aksara dan wajib belajar pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Akan tetapi setelah upaya tersebut dilaksanakan cukup lama di Negara Berkembang, keberhasilan usaha itu tidak terlalu menggembirakan. Kurang berhasilnya upaya tersebut tidak semata-mata merupakan kegagalan program pendidikan dasar, melainkan lingkungan yang besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan program tidak selalu sejalan dengan usaha program. Oleh karena itu untuk mensukseskan program pendidikan dasar tersebut apabila masih dianggap kunci penting bagi keberhasilan pembangunan, faktor-faktor yang menghambat perlu ditangani secara simultan.

**Kemampuan Baca sebagai Penunjang Pembangunan**

Dalam membangun, komunikasi yang efektif antar anggota masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan para agen pembangunan adalah penting. Dalam menyampaikan pesan pembangunan alat komunikasi tulis adalah sarana yang amat diperlukan karena sejumlah kelebihanannya dibanding dengan komunikasi lisan maupun komunikasi audio yang lain. Dengan komunikasi tulis akan dapat dihindarkan kemungkinan distorsi pesan yang biasanya disampaikan secara beranting dalam komunikasi lisan dan audio. Oleh karena itu kemampuan baca tulis sebagai bagian yang integral dari pendidikan dasar mendapat prioritas yang tinggi dalam pembangunan.

Usaha memampubacakan warga masyarakat sebenarnya adalah langkah awal dari usaha pendidikan dasar bagi warga negara. Negara-Negara berkembang yang mempunyai tingkat buta huruf tinggi akan menjadikan program pemberantasan buta aksara sebagai program pendidikan dasar, disamping program pendidikan Sekolah Dasar untuk anak-anak umur SD. Oleh karena itu, keberhasilan kedua program tersebut merupakan realisasi program pendidikan dasar bagi warga negara. Keberhasilannya dengan demikian akan menunjang pembangunan secara ke-

seluruhan, bukan saja bahwa anggota warga akan lebih mudah memahami program pembangunan bagi diri sendiri dan masyarakat di mana ia berada tetapi juga sekaligus terjadinya proses pencerdasan warga serta peningkatan kualitas hidupnya.

Dalam merealisasikan program pendidikan dasar, Negara Berkembang umumnya memrogramkan pendidikan baca tulis lewat pemberantasan buta aksara bagi orang dewasa dan wajib belajar tingkat Sekolah Dasar bagi kanak-kanak. Nalarnya, orang dewasa yang buta huruf pada saatnya akan digantikan oleh generasi yang lebih berkualitas karena ia mampu baca dan mengalami pendidikan dasar lewat pendidikan formal yang format, program dan kondisinya diusahakan lebih memadai.

Dengan pemikiran seperti tersebut diatas, diharapkan dalam kurun waktu tertentu seluruh warga negara akan memperoleh pendidikan dasar, karena terjadi titik temu antara program pemberantasan buta aksara bagi orang dewasa dan wajib belajar bagi anak-anak.

#### **Pendidikan Dasar Bagi Warganegara.**

Karena kemiripan istilah, pengertian pendidikan dasar yang dalam bahasa Inggrisnya adalah "basic education" sering disamakan dengan pendidikan formal Sekolah Dasar (SD). Meskipun pendidikan dasar sering direalisasikan lewat pendidikan Sekolah Dasar, adakalanya pendidikan dasar dilaksanakan pula lewat lembaga pendidikan yang lain, misalnya pemberantasan buta aksara fungsional, pendidikan lewat media elektronik diantaranya radio maupun televisi dan sebagainya. Dengan demikian, pendidikan dasar bukan sinonim Sekolah Dasar.

Cukup banyak arti yang diberikan pada istilah pendidikan dasar, karena pada hakekatnya pendidikan dasar adalah pendidikan minimal yang harus dialami oleh tiap warganegara agar yang bersangkutan dapat menjadi anggota masyarakat yang tahu akan kewajiban dan haknya, memiliki keterampilan untuk mengatasi kesulitan hidupnya dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Karena masyarakatnya berbeda, baik ragam maupun tingkat perkembangannya maka menimbulkan keaneka ragaman rumusan tersebut. Sebagai contoh, suatu buku anonim yang diterbitkan oleh Hindustani Tahini Sangh yang berjudul "Foundation of Living, the Principal of Basic Education" menyatakan bahwa agar pikiran, budi yang ditunjang oleh badan yang tumbuh bebas, maka perlu diterapkannya "basic education". Dalam mewujudkan "basic education" pendidikan perlu dilaksanakan dengan dasar pikiran :

- 1). Bahwa "basic education" adalah child centered dalam arti yang sebenar-benarnya. Dalam proses pendidikan anak perlu benar-benar belajar dalam kebahagiaan hakiki anak seumurnya, tanpa merasa adanya tekanan.

- 2). "Basic education" adalah dinamis, artinya karena anak akan menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, maka disitu ada kaitan atas ruang = masyarakat dimana masyarakat mewadah; dan waktu = masa, periode dimana anak hidup. Oleh karena itu tidak mungkin isi dan proses "basic education" di abadikan, lestari tak pernah diganti.
- 3). "Basic education" adalah ko-operatif. Mungkin ini karena konsep basic education dari India dan sangat berorientasikan akan ajaran Mahatma Gandhi, maka unsur ko-operatif sangat ditonjolkan. Aplikasi dari unsur ko-operatif tersebut adalah sejak dini anak dilatih dapat menyelesaikan tugas dengan bekerja sama dengan orang lain. (Hindustani Tahini Sangh, 1965: 18-20).

Dari pemikiran tentang pendidikan dasar versi tulisan tersebut hanya pada butir dualah yang mirip konsep pendidikan dasar yang saat ini banyak dianut oleh baik Negara Berkembang maupun lembaga internasional yang berkecimpung menangani pendidikan dan pembangunan, meski apabila ditelaah lebih jauh seluruh butirnya adalah menunjang konsep pendidikan dasar dalam praktek. Kembali pada pengertian pendidikan dasar yang bertujuan untuk menunjang pembangunan, maka pada taraf pertumbuhan awal guna menjadi warganegara yang tahu akan kewajiban dan haknya setidak-tidaknya ia harus mampu bacatulis, berhitung, berbahasa yang dipakai secara luas dalam masyarakatnya, dan menguasai pengetahuan umum yang dasar serta keterampilan yang berguna dalam kehidupannya sehari-hari dalam masyarakat. Dengan pengertian tersebut pada dasarnya pendidikan dasar dapat dilaksanakan lewat pendidikan disekolah. Pertanyaan berikutnya adalah sekolah pada jenjang yang mana. Apakah sekolah dasar, sekolah menengah, atau pendidikan tinggi. Untuk menentukan hal ini diperlukan keputusan politik tingkat pimpinan negara, yang didasari oleh pertimbangan pada kelas atau tingkat sekolah apa tujuan-tujuan pendidikan dasar di negara tersebut dapat dicapai. Dalam masalah tersebut, ada negara yang menentukan kelas enam SD, SMP, atau SMA sebagai batasnya, yang umumnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan yang telah atau akan segera dicapai oleh masyarakatnya. Batas yang ditentukan itulah yang menjadi batas wajib belajar dalam negara yang bersangkutan, apabila seluruh perangkat pendukung wajib belajar dapat dipenuhi.

Pada pokoknya, pendidikan dasar bukan saja masalah yang ada di negara-negara yang sekarang berstatus Negara Berkembang. Negara industri yang sekarang sering disebut Negara Maju pada saatnya di masa yang lalu juga berjuang mencapai pendidikan dasarnya. Karena saat itu telah berlalu, maka masalah pendidikan dasar saat ini tidak menjadi isu sentral dalam sistem pendidikannya.

### **Problema Mencapai Pendidikan Dasar bagi Seluruh Warganegara**

Dua dekade yang lalu lewat program pemberantasan buta aksara dan perluasan kesempatan untuk masuk pendidikan formal tingkat SD dengan optimisme yang tinggi Negara Berkembang menyelesaikan tahap demi tahap program pendidikan dasar. Negara berkembang umumnya menargetkan pendidikan dasar sebagai setara dengan SD enam tahun. Dengan demikian program pendidikan dasar untuk seluruh warganegara diselesaikan melalui perulasan SD atau wajib belajar tingkat SD dan bagi orang dewasa diselesaikan lewat pemberantasan buta aksara fungsional.

Kenyataan yang ada pada saat ini bila ditinjau dari keadaan global (seluruh bola planet Bumi) Negara Berkembang, usaha mencapai pendidikan dasar mengalami sejumlah hambatan. Perhitungan-perhitungan tentang target yang dapat dicapai ternyata banyak mengalami kemelesetan. Beberapa masalah yang menjadi hambatan adalah hal-hal berikut ini :

- 1). Keterbatasan sumber daya yang semakin memburuk
- 2). Pertambahan penduduk yang belum terkendalikan sesuai dengan rencana
- 3). Jumlah penduduk yang tinggi
- 4). Bencana alam yang besar sehingga merupakan bencana nasional
- 5). Peperangan yang terjadi di dalam negara
- 6). Jumlah drop out sekolah dasar dan menengah yang tinggi
- 7). Menghadapi masalah "menjadi buta aksara kembali"
- 8). Mendapat dampak yang buruk oleh adanya resesi ekonomi.

Sejumlah Negara Berkembang mengalami salah satu masalah tersebut atau kombinasi dari beberapa masalah. Dengan adanya permasalahan tersebut jelaslah jika program untuk merealisasikan cita-cita pendidikan dasar untuk seluruh warganegara menjadi terhambat, bahkan mengalami kemunduran. Suatu proyeksi keadaan itu digambarkan oleh lembaga internasional UNESCO seperti berikut. Jika tren yang lalu masih berlangsung, maka diramalkan bahwa pada tahun 2000 jumlah anggota masyarakat di dunia yang buta aksara akan menjadi satu biljun, suatu angka yang setara dengan sepertiga orang dewasa yang ada di dunia (Sylvain Lourie dan Hans Reiff, 1988; 1-2). Tentu saja ini adalah proyeksi yang kurang menggembirakan. Namun suatu ramalan tentu mempunyai dasar yang cukup.

Apa sumber dari ramalan tersebut? Salah satu sumbernya adalah Negara-negara Berkembang yang penduduknya besar dan memiliki tingkat pertambahan penduduk yang tinggi pula. Walaupun telah melaksanakan program pemberantasan buta aksara dan perluasan kesempatan masuk sekolah dasar, negara dengan angka penduduk yang tinggi sekaligus pertambahan penduduk yang tinggi mempunyai peran meningkatkan jumlah angka absolut penduduk yang buta aksara secara global. Angka buta aksara tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1  
Negara dengan Angka Buta Aksara 30% atau Lebih

Negara	Tingkat Buta Aksara (% per negara) 1975	Jumlah dalam jutaan
India	56,5	264
RRC	30,7	229
Pakistan	70,4	39
Bangladesh	66,9	37
Negeria	57,6	27
Mesir	55,5	16
Iran	49,2	12

UNESCO office of Statistics, Juli 1985.

Dari angka dan presentase tersebut nampak bahwa meskipun suatu negara telah berusaha melaksanakan program pemberantasan buta aksara tetapi jumlah angka nyatanya (angka absolut) yang tersisa masih tetap besar.

Lebih lanjut angka drop out, termasuk drop out SD masih tetap menjadi kendala dalam usaha merealisasikan pendidikan dasar, karena drop out ada kemungkinan menjadikan buta aksara kembali. Usaha yang dilaksanakan secara besar-besaran untuk memberi tempat pada anak umur SD di sekolah sering digagalkan oleh dropu out yang besar. Gambaran tentang besarnya anak drop out di Negara Berkembang dapat diamati pada tabel 2 berikut :

Tabel 2  
Anak yang Tidak Bersekolah Kelompok Umur 6-12 th.  
(dalam jutaan)

Kawasan	1965	1975	1985
Negara Maju	9	7	7
Negara Berkembang	110	121	130
Afrika	30	32	34
Amerika Latin	14	11	9
Asia Timur	0,5	0,1	0,1
Asia Selatan	66	77	86

UNESCO Office of Statistics, Paris 1987.

Dari angka yang tertera dalam tabel, nampak bahwa anak umur sekolah dasar yang tidak bersekolah di Negara Berkembang cukup besar, dan angkanya meningkat tiap dekade. Data UNESCO menunjukkan bahwa dalam skala global anak dan remaja yang tidak bersekolah semakin meningkat di Negara Berkembang. Peningkatan tersebut kurang lebih adalah satu juta per tahun.

Untuk dapat dilihat lebih lanjut angka untuk remaja yang tidak bersekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 3  
Remaja yang Tidak Bersekolah kelompok umur 12-17 th.  
(dalam jutaan)

Kawasan	1965	1975	1985
Negara Maju	23	19	12
Negara Berkembang	139	173	197
Afrika	32	37	41
Amerika Latin	18	19	19
Asia Timur	5	3	1
Asia Selatan	88	115	137

Dari angka tersebut keadaan remaja di Negara Berkembang juga tidak menggemirakan. Dalam laporan per negara biasanya yang tersaji adalah persentase umur anak sekolah yang telah terdaftar dan angka persentase penduduk dewasa buta aksara yang telah ditangani, dst. Problem bahwa akhirnya anak yang telah terdaftar tersebut tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar atau sekolah menengahnya tidak digambarkan dalam satu sajian.

Suramnya prospek pendidikan dasar di Negara Berkembang sebenarnya tidak seluruhnya merupakan kegagalan pendidikan. Kondisi tersebut lebih merupakan akibat dari suatu kemiskinan yang meningkat karena berbagai sebab, diantaranya meningkatnya hutang dari Negara-negara berkembang (Lourie S. & Reiff, H., 1988, 12).

Masalah drop out yang menjadi buta aksara kembali merupakan ciri khas Negara berkembang dan merupakan interaksi dari permasalahan yang dihadapi Negara Berkembang yang kondisinya kurang menguntungkan. Sepuluh negara yang memiliki populasi tinggi anak dan remaja drop out adalah negara-negara berikut :

Tabel 4  
Anak Umur 6-11 th. yang tidak mengikuti pendidikan di 10 Negara Berkembang (dalam jutaan)

Negara	Jumlah th. 1985	% anak umur SD
India	22,5	25
Pakistan	11,0	70
Bangladesh	6,7	45
Ethiopia	5,5	81
Nigeria	4,1	26
Afganistan	2,7	85
Sudan	2,3	33
Egypt	2,3	33
Tanzania	2,0	46
Uganda	1,4	49

(Education and Employment Division, Population and Human Resources Department, World Bank, Washington D.C. 1987). Persen (%) anak umur SD dalam tabel dimaksudkan sebagai persen dari jumlah anak umur sekolah dasar di masing-masing negara.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, drop out yang menjadi buta huruf kembali adalah bukan semata-mata kegagalan dalam pendidikan. Negara Berkembang yang kurang beruntung seakan-akan menghadapi lingkaran setan yang membelit seluruh potensinya untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Studi di Afrika menunjukkan bahwa pengalaman bersekolah maupun kemampuan baca tulis yang tidak ditunjang dengan menghadapi tantangan keadaan yang setara dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan yang telah diperoleh tidak akan berkembang melainkan akan menurun (T.O. Aisemon dalam Aisemon, 1988, 25-27). Anak yang keluar dari sekolahnya saat ia kelas tiga dan sehari-hari bekerja di sawah serta dalam kehidupan sehari-harinya tidak ditantang oleh keadaan yang menuntut ekspresi kemandirian yang diperoleh dari sekolah, maka kemampuan itu akan terkikis oleh waktu dan akhirnya terlupakan. Dalam hal tuntutan untuk mengembangkan kemampuan yang diperoleh di sekolah, anak penjual koran dan majalah lebih mempunyai kesempatan dan dituntut untuk tetap mampu baca dan kemampuan lain yang diperolehnya di sekolah. Anak penjual koran di Indonesia perlu tahu mana koran Kompas, Angkatan Bersenjata, Indonesia Observer. Ia harus bisa meneriakkan berita gempar apa yang ada di koran Pos Kota. Ia juga perlu tahu majalah apa saja yang dijualnya, masing-masing berapa harganya. Ia harus trampil menghitung uang, memberikan uang kembali dengan cekatan dan sebagainya. Pada saat senggang ia "terpaksa" mengisi waktu dengan membaca bahan tertulis dagangannya.

Masalah menjadi buta aksara kembali telah melahirkan banyak studi tentang retensi hasil studi di sekolah dasar dan selanjutnya juga studi tentang tingkat berapa yang tepat dari Sekolah Dasar apabila terpaksa dapat ditinggalkan dengan akibat yang minimal untuk menjadi buta aksara kembali. Studi Hartley dan Swanson menunjukkan bahwa lamanya bersekolah cenderung memperkuat retensi apa yang dipelajari. Ini adalah sangat wajar. Demikian pula orang dewasa yang hanya belajar satu tahun cenderung menjadi buta aksara kembali (Hartley dan Swanson dalam Eisemon, 1988, 28-29). Implikasi dari penemuan ini adalah pentingnya program pemberantasan buta aksara dilakukan lebih lama tidak sekedar telah dapat membaca saja. Sayang sekali evaluasi secara rinci tentang pelaksanaan pendidikan dasar jauh ketinggalan daripada evaluasi tentang Sekolah Dasar yang merupakan pendidikan formal. Di Afrika misalnya, pendidikan orang dewasa, termasuk program pendidikan dasarnya umumnya tidak dilakukan evaluasinya (Thomson A.R., 1981, 212).



Sejak tahun 60an Lembaga Internasional yang menangani pendidikan telah ikut berperan serta menanggulangi masalah pendidikan dasar diantaranya lewat program Karachi Plan. Waktu itu Karachi Plan merancang pendidikan dasar untuk semua kelompok umur di kawasan Asia dan dirancang dapat diselesaikan pada tahun 1980 (Donald Bewley, 1986, 71). Kenyataannya dengan segala usaha yang dibekali oleh banyak sumber keadaan tersebut belum dapat dicapai.

### **Dampak Kemiskinan, Problem Kependudukan pada Pendidikan Dasar**

Bangladesh, suatu negara yang selalu diberitakan mengalami berbagai musibah mempunyai gambaran kondisi SD sebagai berikut: Dari anak umur SD yang terdaftar di Sekolah Dasar ada 64%. Tiap hari rata-rata yang hadir hanya 50%. Anak kelas satu pada akhir tahun akan drop out rata-rata 60% Rata-rata hanya 12% dari yang terdaftar semula mencapai kelas lima (UNESCO, 1986, 25). Keadaan yang demikian itu juga sulit bagi bantuan eksternal (luar negeri) untuk ikut membantu karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi yang umumnya ada di luar sektor pendidikan. Kendala yang paling berat dalam melaksanakan pendidikan dasar seperti apa yang dikemukakan oleh Lourie dan Reif adalah kemiskinan pada tingkat yang paling buruk, yaitu taraf mana orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah kebutuhan "survival" dalam arti fisik. Pada saat keadaan orang sibuk mencari sesuap nasi untuk dimakan hari itu juga, pendidikan dasar tidak mempunyai arti penting bagi yang bersangkutan.

Kondisi kemiskinan berkait dengan masalah pendapatan. Gambaran hubungan antara pendapatan dengan hasil belajar dapat kita simak dari dua negara sesama negara Amerika Latin. Apabila kita tinjau dari pendapatan perkapita, maka negara bertetangga Chili dan Bolivia mempunyai perbedaan yang cukup tajam dengan Chili sebagai pihak yang lebih maju. Oleh karena itu, apa yang dicapai lewat usaha pendidikan dasar Bolivia ada pada kondisi yang lebih rendah. Sajian dalam tabel berikut dapat dipakai untuk menggambarkan peran pendapat pada pencapaian hasil pendidikan.

**Tabel 5**  
**Waktu yang Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan Kelas Lima SD.**  
**(dalam satu tahun)**

Tingkat Pendapatan	1975	1980	1984
Pendapatan rendah	8,5	8,6	9,0
Pendapatan Menengah Rendah	7,6	7,4	7,2
Pendapatan Menengah Tinggi	6,5	6,4	6,3
Pendapatan Tinggi	6,0	5,6	5,4

Education and Employment Division, World Bank, 1988.

Dari tabel tersaji nampak pendapatan rendah tidak saja lebih lama mencapai tingkat pendidikan dasar kelas lima dibanding dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, tetapi juga tidak mengalami perbaikan setelah ada perubahan waktu tahun 1980 dan tahun 1984 seperti tingkat pendapatan yang lebih tinggi pendapatannya, melainkan masalah mengalami kemunduran.

Dari studi yang lain dinyatakan bahwa guru di sekolah miskin secara tidak sadar tidak memberikan dorongan pada saat mengajar. Oleh karena itu, anak-anak di daerah miskin seakan mengalami kemiskinan ganda, yaitu setidaknya tidaknya kemiskinan harta, perhatian, dan dorongan dari gurunya. Studi etnografis dari Avalos menyatakan bahwa orang tua menyatakan bahwa anaknya sedih apabila di sekolah.

Membicarakan pendidikan bagi kaum miskin dari kawasan Amerika Latin, nama Paulo Freire tak dapat ditinggalkan atas metodenya mendidik mereka yang terdesak karena kemiskinannya agar mau belajar membaca dan lebih dari itu, menumbuhkan minat untuk berusaha melepaskan dirinya dari kemiskinan.

#### **Pendidikan Dasar Integratif sebagai Model Alternatif**

Melihat kurang berhasilnya investasi yang demikian besar dalam pelaksanaan pendidikan dasar, berikut ini adalah pemikiran tentang model pendidikan dasar yang diilhami oleh beberapa pelaksanaan pendidikan dasar lewat pemberantasan buta aksara, pendidikan non formal dan pendidikan Sekolah Dasar di berbagai Negara Berkembang. Praktek pelaksanaan tersebut dipilih yang berhasil, dipadukan dengan menghilangkan kelemahannya yang dapat dipantau selama ini.

Dalam pemikiran ini, pendidikan dasar integratif adalah pendidikan dasar yang pelaksanaannya mengintegrasikan secara padu antara pendidikan formal Sekolah Dasar dengan berbagai modifikasi format pelaksanaannya dan pemberantasan buta aksara. Perubahan format SD dititikberatkan pada peningkatan fleksibilitasnya sedang pemberantasan buta aksara fungsional diupayakan sepadan dengan pendidikan di SD. Adapun maksud dari ide integratif karena kedua program dapat diikuti sebagai paket yang bisa dipindahkan nilai kreditnya.

Selanjutnya, membuat Sekolah Dasar menjadi fleksibel pelaksanaannya, salah satu alternatifnya adalah mengadopsi model SMP Terbuka. Bedanya, SMP Terbuka berinduk pada SMP reguler yang telah mapan, sedangkan SD integratif lahir bersama SD induknya. SD induk merupakan pusat yang setara dengan SMP induk pada SMP Terbuka. Dengan format ini, anak SD yang berperan sebagai pencari nafkah, membantu bekerja orang tuanya, menjadi pembantu rumah tangga dan lain sebagainya dapat memilih kelompok belajar yang cocok dengan waktu luangnya.

Pemberantasan buta aksara fungsional bagi kanak-kanak adalah untuk memberi kemungkinan pada anak umur SD dapat memperoleh pendidikan non formal sementara untuk memasuki pendidikan formal masih belum mungkin karena kendala waktu keuangan dan kesempatan.

Kedua program yang berinduk pada pendidikan formal dan pendidikan non formal yaitu SD dan pemberantasan buta aksara fungsional untuk kanak-kanak tersebut berada dalam satu naungan pendidikan dasar integratif. Maksudnya, siswa SD integratif yang pada suatu saat terpaksa tidak dapat mengikuti pelajaran dalam pendidikan formal betapa pun fleksibelnya, maka ia dapat mengikuti program pemberantasan buta aksara fungsional. Pada saat lain, ia dapat kembali karena kedua program tersebut ada dalam satu naungan.

Tidak dapat diungkiri, betapapun suatu upaya mengatasi masalah pasti akan menimbulkan masalah baru. Gagasan ini timbul karena problem yang tersaji dalam tulisan ini, masih perlu dikaji dan dibuat rumusan pelaksanaannya.

#### **Daftar Pustaka**

- Anonim, 1975, *Foundation of Living, the Principle of Basic Education*, Hindustani Tahimi Sangh, New Delhi.
- Eisemon, Thomson, Owen, 1988, *The Qonsequence of Schooling: A Review of Research on the Outcomes of Primary Schooling in Developing Countries*, BRIDGES, Bureau of Science and Technology, USAID, Washington D.C.

Grant, J.,P., 1985. *The State of the World's Children 1986*, Oxford University Press.

Lourie, Sylvain and Hans, Reiff, 1988, *Toward International Strategy of Basic Education for All*, Document for Plenary Meeting in International Working Group on Education, IIEP-UNESCO, Paris.

Thomson, A.,R., 1981, *Education and Development in Africa*, Sint Martin's Press, New York.

UNESCO, 1986, *UNESCO- UNICEF Cooperation in Asia and Pacific*, UNESCO Regional Office, Bangkok.